

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan produk unggulan daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka mendorong pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya saing produk unggulan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Salah satu strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tata kelola kolaborasi yang terjadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan produk unggulan ikan julung-julung (*hemiramphus sp*) di Pulau Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi, serta dilakukan analisis secara mendalam. Berpedoman pada empat dimensi kolaborasi menurut teori *collaborative governance* menurut Chris Ansell dan Alison Gash yaitu proses kolaborasi, kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang terjadi belum efektif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pengembangan produk unggulan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya ketidakseimbangan sumber daya dan wewenang pada kondisi awal kolaborasi, aturan dasar dan transparansi proses kolaborasi dalam desain kelembagaan dan belum maksimalnya fungsi kepemimpinan fasilitatif.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, *Stakeholder*, Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

ABSTRACT

The policy for developing regional superior products is one of the efforts made by the regional government of East Seram Regency in order to encourage natural resource management, increase the competitiveness of superior products and develop small and medium enterprises. One of the strategies undertaken to implement the policy is to collaborate between stakeholders in order to resolve the problems faced. This study aims to find out how the collaborative governance process occurs and identify the factors that hinder collaboration between stakeholders in the development of superior products of *julung-julung* fish (*hemiramphus sp*) on Keffing Island, East Seram Regency. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques in this study were carried out through a process of observation, interviews, documentation, and in-depth analysis. Based on the four dimensions of collaboration according to the collaborative governance theory according to Chris Ansell and Alison Gash, namely the collaboration process, initial conditions, institutional design and facilitative leadership, the results of this study indicate that the collaboration process that has occurred has not been effective in solving problems faced in developing regional superior products. The influencing factors are the imbalance of resources and authority in the initial conditions of collaboration, the basic rules and transparency of the collaboration process in the institutional design and the not yet maximized facilitative leadership function.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Regional Superior Product Development.